

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	14
BAB II - HAKIKAT WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN.....	16

2.1	Wakil Presiden dalam Sistem Presidensiil	16
2.2	Wakil Presiden dalam Perspektif Sejarah Konstitusional Indonesia	20
2.2.1	Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Indonesia dari Masa ke Masa.....	23
BAB III - KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN KONSTITUSIONAL WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIL.....		48
3.1	Perbandingan Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden	49
1.	Amerika Serikat	49
2.	Filiphina	53
3.2	Kedudukan dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden dalam Sistem Presidensiil di Indonesia	56
3.2.1	Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia.....	56
3.2.2	Kekuasaan Wakil Presiden di Indonesia.....	62
3.2.3	Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam UUD NRI 1945	68
3.3	Hubungan Hukum Wakil Presiden dengan Presiden dalam Sistem Presidensiil di Indonesia pada Masa Mendatang.....	72
3.3.1	Penjelasan istilah “dibantu” dalam Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945	72
3.3.2	Faktor yang Mempengaruhi Jabatan Wakil Presiden di Indonesia.....	75
BAB IV - PENUTUP.....		78
4.1	Kesimpulan.....	78
4.2	Saran.....	79
DAFTAR BACAAN.....		xv

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tahun 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian Dengan Hormat
Dr. Mohammad Hatta Sebagai Wakil Presiden

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden
Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada
Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-
hari

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014

United States Constitution 1789 (rev. 1992)

Philippines's Constitution of 1987